

Pemantauan Dampak Sosial-Ekonomi Krisis Keuangan Global 2008/09 di Indonesia

Dampak terhadap Pertanian Indonesia, sampai Agustus 2009

November 2009

Pemantauan
Media
No.05/LF/2009

Lembaran Fakta

Informasi yang dikumpulkan dari berbagai media daerah dan nasional memperlihatkan bahwa krisis keuangan global (KKG) 2008/09 memengaruhi beberapa subsektor pertanian di Indonesia, terutama komoditas-komoditas ekspor. Hasil pertanian yang terkena dampak negatif meliputi beberapa komoditas subsektor perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao dan kopra, yang berada di wilayah Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Kalimantan; beberapa komoditas subsektor tanaman pangan, yaitu jagung dan singkong, di Lampung; dan beberapa komoditas subsektor perikanan di Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Secara tidak langsung, krisis juga menurunkan permintaan terhadap ayam di luar Jawa yang terjadi seiring turunnya daya beli masyarakat perkebunan sawit dan karet.

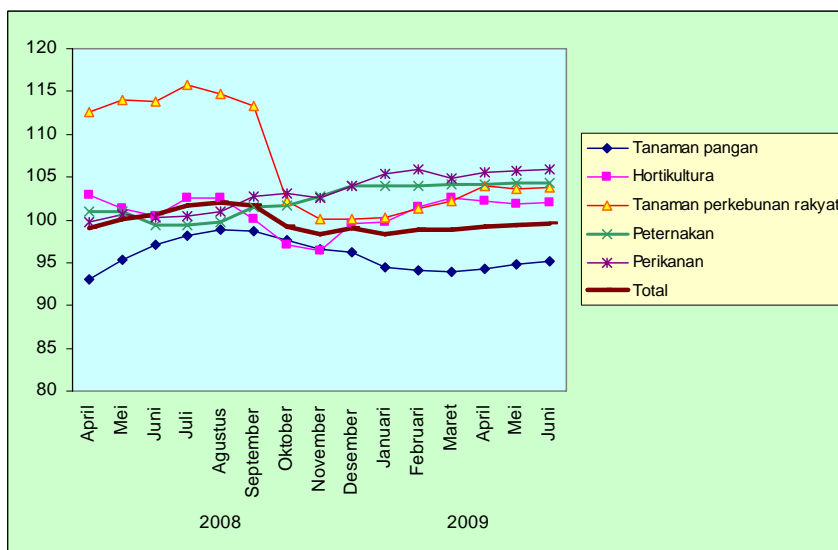
Gambaran Umum Dampak terhadap Sektor Pertanian

Sebagian besar perekonomian dunia terkena imbas KKG 2008/09 melalui jalur perdagangan dan jalur finansial. Tertekannya kinerja ekspor akibat anjloknya harga berbagai komoditas ekspor berdampak cukup kuat, khususnya terhadap negara-negara pengeksport komoditas berbasis sumber daya alam. Selain itu,

dampak KKG 2008/09 terhadap seluruh dunia, termasuk kawasan Asia, juga terlihat dari turunnya indeks bursa saham ke tingkat yang berada di luar perkiraan.

Di Indonesia, imbas krisis mulai terasa menjelang akhir 2008. Hal ini tercermin dari melambatnya pertumbuhan ekonomi secara signifikan, terutama karena anjloknya kinerja ekspor seiring dengan turunnya harga berbagai komoditas unggulan, seperti kelapa sawit dan karet. Secara langsung, penurunan tersebut memukul sebagian petani di Indonesia. Petani juga telah kehilangan sebagian pasar produk pertanian mereka di Amerika Serikat (AS) dan negara-negara yang menjadi mitra AS seperti Singapura, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Eropa.

Dampak krisis terhadap petani dapat dilihat, antara lain, dari perubahan nilai tukar yang diterima petani (NTP)¹. Secara nasional, sejak April 2008, NTP meningkat terus dan mencapai titik tertinggi (101,69) pada September 2008. Pada Oktober 2008, NTP turun ke level 99,2 dan turun terus; NTP mencapai titik terendah pada level 98,99 pada Januari 2009. Meskipun sejak Januari 2009 NTP merambat naik, data bulan Juni menunjukkan bahwa NTP belum mencapai level 100. Data per komoditas (Gambar 2) memperlihatkan penurunan NTP yang cukup tajam untuk tanaman perkebunan rakyat dan hortikultura.



Gambar 1. Nilai tukar petani berdasarkan komoditas (2007=100)

Dampak terhadap Subsektor Perkebunan

Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan primadona komoditas ekspor subsektor perkebunan Indonesia. Sebagian besar areal perkebunan kelapa sawit berada di seluruh provinsi di Sumatra dan Kalimantan, dan sebagian berada di Papua. Total lahan perkebunan sawit Indonesia mencapai 7,1 juta ha. Sekitar 60% areal tersebut berada di Sumatra (4,8 juta ha) dan sisanya berada di Kalimantan dan Papua.

Saat KKG 2008/09 melanda dunia, permintaan ekspor minyak sawit turun drastis dan harga minyak sawit mentah (CPO) dan tandan buah segar (TBS) sawit menurun tajam. Sebelum krisis, harga CPO dapat mencapai US\$1.400 per metrik ton, namun pada saat krisis, harga CPO hanya berkisar antara US\$400–US\$500 per metrik ton. Demikian pula halnya dengan harga TBS sawit. Sebelum krisis, harga di tingkat petani berkisar antara Rp1.500–Rp2.000 per kg, tetapi selama krisis ini, harga TBS sawit hanya Rp350–Rp500 per kg. Padahal, bila harga TBS Rp500 per kg, setelah dikurangi ongkos dan biaya-biaya lain, keuntungan petani hanya Rp150 per kg.

Dari semua petani sawit, petani nonplasmalah yang paling merasakan dampak krisis karena buah sawit mereka dihargai lebih rendah dari buah sawit petani plasma dan tidak ada yang menjamin bahwa pabrik akan membeli sawit mereka. Namun, produsen minyak sawit dan petani sawit plasma juga dirugikan. Diberitakan bahwa pembatalan kontrak CPO dari 21 perusahaan di India mengakibatkan ekspor CPO Sumatra Selatan turun 30% dan 95 perusahaan minyak sawit merumahkan 30 ribu dari 100 ribu buruh harian lepasnya. Di Kotawaringin, Kalimantan Tengah, sebuah perusahaan minyak sawit juga meliburkan 900 buruh harian lepas. Di Kalimantan Barat, 2 dari 14 investor asing yang telah mempunyai izin membuka perkebunan sawit menunda realisasinya. Sebanyak 22 pabrik minyak sawit di Kalimantan Barat juga menurunkan produksi CPO-nya sebesar 10%–12% dari rata-rata produksi per bulan 58.300 ton menjadi 46.670–52.500 ton. Ekspor produk turunan sawit, seperti minyak *oleochemical*, juga turun 50%.

Akibat KKG 2008/09, petani sawit dan pedagang pengumpul di Provinsi Riau tidak dapat mengembalikan kredit investasi dan modal kerja, serta kredit cicilan motor. Menurut data Bank Indonesia Riau, sebanyak 11.304 petani sawit dengan total kredit Rp335 miliar bermasalah dengan pengembalian kreditnya. Selain itu, 543 dari 4.500 sepeda motor kredit ditarik karena kredit macet (86% pengkredit sepeda motor adalah petani sawit). Bank Indonesia Riau juga mencatat bahwa 104.000 keluarga petani plasma dan 174.978 keluarga petani nonplasma menghadapi kesulitan membayar utangnya ke bank yang besarnya mencapai Rp1,2 triliun. Di Sumatra Utara, turunnya harga sawit dan naiknya harga pupuk (sampai 500%) membuat petani tidak mampu membeli pupuk dan merawat tanamannya sehingga produksinya menurun.

Untuk bertahan hidup selama krisis, banyak petani sawit menjadi buruh di kebun orang lain. Mereka berusaha mengangsur kredit dengan penghasilan dari hasil kebun lainnya, seperti padi, karet, kakao, atau kopi; atau dengan bergotong royong dengan saudara atau tetangganya. Di tingkat pengusaha, sebagian menunda perluasan kebun dan peremajaan tanaman, memotong

biaya produksi hingga 50%, dan merumahkan buruh lepas. Bank-bank menjadwalkan ulang pinjaman nasabah yang berhubungan dengan sawit, menurunkan suku bunga pinjaman, dan menganjurkan penambahan investasi. Pemerintah berupaya membantu dengan mengurangi pajak ekspor CPO pada November menjadi 0%; menetapkan bea masuk 0% bagi bahan baku impor produksi hilir yang sebagian berbahan CPO; mewajibkan sektor transportasi, industri, dan pembangkit tenaga listrik untuk menggunakan bahan baku nabati (CPO) sebesar 5%; dan mewajibkan peremajaan tanaman tua.

Pada semester I 2009, harga TBS sawit dan minyak sawit mulai meningkat, antara lain, karena naiknya harga minyak dunia, kegagalan panen kedele—yang merupakan salah satu bahan baku *biofuel*—di Amerika Serikat, meningkatnya pembelian cadangan CPO Cina, dan kebijakan wajib mencampur *biofuel* sebanyak 5% dengan BBM di Indonesia dan Malaysia. Pada Juni 2009, harga TBS sawit di Sumatra Selatan naik menjadi Rp1.484,58 per kg. Pada triwulan II 2009, harga CPO dunia sudah meningkat menjadi US\$750 per metrik ton.

Karet

Karet termasuk komoditas utama perkebunan Indonesia setelah kelapa sawit. Turunnya tingkat penjualan mobil di AS sangat berpengaruh terhadap permintaan karet dunia karena sebagian besar karet merupakan bahan mentah bagi produksi pendukungomotif. Pada Juni 2008, harga karet dunia masih 329,75 sen AS per kg. Pada September 2008, harga karet turun menjadi 280,5 sen AS per kg, kemudian turun lagi menjadi 152 sen AS per kg pada Oktober 2008, dan menyentuh level 120 sen AS per kg pada Desember 2008.

Penurunan harga karet dunia mengakibatkan permintaan dan harga karet Indonesia turun secara tajam. Di Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, harga *lump* (gumpalan) karet turun dari Rp9.000–Rp13.000 per kg menjadi Rp2.000–Rp4.000 per kg. Di Sukabumi, Jawa Barat, harga lump karet turun dari Rp7.000 per kg sebelum krisis menjadi Rp3.000 per kg. Harga karet lembaran (*RSS-ribbed smoked sheet*) di Sukabumi yang sebelum krisis mencapai Rp24.000 per kg turun menjadi Rp19.000 per kg pada saat krisis. Turunnya harga karet menyebabkan banyak petani karet tidak mau menyadap dan memelihara pohon karetnya, dan pasokan ke pabrik berkurang drastis. Di Jambi, produksi karet turun 30% dari 60.000 ton per bulan menjadi 42.000–45.000 ton. Oleh karena itu, pabrik karet menurunkan produksinya dan mengurangi jumlah hari kerja buruh dari dua minggu menjadi tiga hari. Di Sumatra Barat, 3.000 buruh dari 6 pabrik karet menganggur karena pabrik-pabrik tersebut berhenti beroperasi akibat kekurangan bahan baku.

Petani karet juga tidak mampu membeli pupuk dan pendapatannya berkurang 50%. Petani karet di Banyuasin, Sumatra Selatan, misalnya, mengatakan bahwa sejak Oktober 2008, pendapatan mereka dari empat hektare kebun karet hanya 2–3 juta rupiah per bulan, padahal sebelumnya bisa mencapai 5–6 juta rupiah per bulan. Bahkan sebagian petani karet di Banyuasin menjual murah kebun karet mereka seharga sekitar 30 juta rupiah per bidang atau hektare. Padahal harga normalnya berkisar antara 45–60 juta rupiah. Selain itu, banyak petani karet menunggak pembayaran utang di koperasi dan cicilan sepeda motor, seperti yang terjadi pada 90 petani karet di Muaro Jambi.

Setelah berhenti menyadap karet saat krisis, petani karet beralih mengurus tanaman lain yang lebih menguntungkan atau menjadi buruh di kebun orang lain. Pengepul karet mengurangi pembelian karet atau menjual karet bersih yang harganya lebih mahal dari lump karet. Saat krisis, peremajaan tanaman karet tertunda dan Pemerintah Pusat mengeluarkan aturan untuk tidak membuka kebun baru serta mengkoordinasi pemasaran karet dengan negara penghasil karet lainnya seperti Malaysia dan Thailand.

Seiring makin stabilnya harga minyak dunia pada awal hingga pertengahan 2009, terjadi beberapa kali perubahan harga karet. Pada Januari 2009, harga karet naik dari Rp3.500 per kg menjadi Rp4.000 per kg dan naik lagi menjadi Rp5.000 per kg setelah itu sehingga pada Juni 2009 harga karet bertahan di level Rp5.500–Rp6.000 per kg.



Gambar 2. Harga karet turun tajam, petani karet tidak mau menyadap karet

Kopi

Indonesia merupakan salah satu produsen kopi utama di dunia di samping Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Sebagian produksi kopi Indonesia diekspor ke AS, Jepang, Eropa, dan Cina. Akibat KKG 2008/09, permintaan dan harga kopi dunia menurun sehingga permintaan ekspor dan harga kopi di Indonesia pun menurun. Harga kopi di pasar internasional turun dari US\$3.800 per metrik ton sebelum krisis menjadi US\$3.200 per metrik ton.

Selama krisis, permintaan ekspor kopi dari Jawa Timur menurun sampai 25%–30% dan harga kopi turun dari Rp18.000 per kg menjadi Rp16.000 per kg. Demikian pula halnya di Bandar Lampung. Mulai September 2008, harga kopi asalan di tingkat petani turun drastis dari Rp25.000 per kg menjadi Rp16.000 per kg. Di Sumatra Selatan, harga kopi turun dari harga normal Rp15.000 per kg menjadi Rp11.000 per kg. Sebanyak 90% produk kopi Sumatra Selatan diekspor melalui Lampung. Karena ekspor kopi sedang lesu, gudang-gudang kopi Lampung penuh dengan kopi dari Sumatra Selatan. Turunnya harga kopi juga membuat sebagian besar dari sekitar 400 pengeksport kopi di Sumatra Utara (Sumut) yang terdaftar di Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) gulung tikar. Oleh karenanya, pada pertengahan 2009, hanya ada 60 pengeksport kopi yang masih aktif. Kerugian pengeksport kopi di Sumut terutama dipicu oleh pembelian kopi saat harga di tingkat petani masih cukup tinggi jauh hari sebelum KKG 2008/09. Pengeksport kopi arabika di Sumut menjadi kelompok yang paling terpuak karena turunnya permintaan ekspor kopi ke AS.

Kakao

Indonesia termasuk produsen utama kakao setelah Pantai Gading dan Ghana. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), luas perkebunan kakao di Indonesia pada 2008 mencapai 1.592.932 ha, dengan produksi biji kakao sebanyak 849.875 ton. Harga rata-rata biji kakao yang tercatat di Ditjenbun pada 2008 adalah Rp15.136 per kg dan pada 2009 naik menjadi Rp24.819 per kg. Saat krisis, diberitakan bahwa harga kakao di Bali turun dari Rp31.000 per kg menjadi Rp17.000 per kg, sedangkan di Deli Serdang, Sumut, harganya turun dari Rp20.000 per kg menjadi Rp16.000 per kg. Di Sulawesi Selatan, ekspor kakao yang saat sebelum krisis, selama periode Januari–Mei 2008, mencapai 47.240,395 ton hanya tercatat 37.204,429 ton pada periode yang sama pada 2009.

Sepanjang 2009, 12 dari 14 pabrik penggilingan biji kakao yang ada di Indonesia menghentikan produksinya; bahkan 4 di antaranya sudah tutup. Hanya tinggal dua pabrik penggilingan biji kakao—yang memproduksi *cocoa powder* dan *cocoa butter*—yang masih beroperasi. Satu pabrik berlokasi di Tangerang dan satu lainnya di Bandung; total kapasitas produksi keduanya adalah 100.000 ton per tahun. Turunnya aktivitas pabrik-pabrik tersebut disebabkan oleh permintaan ekspor produk kakao di pasar AS dan Eropa yang terus menurun, harga ekspor produk kakao yang juga turun, dan *cash flow* (aliran dana) pabrik yang terhambat akibat waktu pembayaran yang lebih panjang dari biasanya (dari 10 hari menjadi 1–1,5 bulan).

Kopra

Merosotnya harga minyak dunia pada triwulan IV 2008 juga berimbas pada harga kopra. Di Padang Pariaman, Sumatra Barat, harga kopra merosot dari Rp8.000 per kg menjadi Rp4.200 per kg. Karena harga kelapa yang menjadi bahan baku kopra tetap stabil, pengusaha kopra tidak mendapat untung. Di Jambi, dilaporkan bahwa penurunan harga kopra sudah terjadi sejak akhir 2008. Harga kopra yang semula Rp7.000 per kg turun menjadi Rp3.600 per kg. Tidak seperti di Padang Pariaman, harga kelapa butir di Jambi ikut turun dari Rp1.500 per butir menjadi Rp700 per butir. Untuk menambah penghasilan, petani kopra memanfaatkan batok kelapa untuk diolah menjadi arang batok yang bisa di jual kepada pedagang pengepul dengan harga Rp1.200 per kg. Arang batok ini sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan di Malaysia. Selain itu, sebagian petani kopra mengalihkan usahanya ke kegiatan memanen pinang yang banyak ditanam di Jambi. Harga pinang di tingkat petani cukup baik dan stabil di tingkat Rp4.000 per kg, meski pada 2006 harganya pernah jatuh hingga Rp2.000 per kg.

Dampak terhadap Subsektor Tanaman Pangan

Jagung

Pemberitaan mengenai perkembangan harga komoditas jagung memperlihatkan adanya perbedaan pengaruh KKG 2008/09 di Provinsi Lampung dan Provinsi Gorontalo. Sejak awal November 2008, petani jagung di Provinsi Lampung mengeluhkan turunnya harga jagung basah dari Rp1.800–Rp2.000 per kg menjadi Rp1.000–Rp1.100 per kg. Petani Lampung tidak biasa mengeringkan jagung; mereka langsung menjual jagung siap panen ke pedagang pengumpul yang akan mengeringkan dan memilih jagung untuk kemudian dijual ke pabrik pakan ternak. Sebaliknya, di tengah lesunya

ekspor berbagai komoditas pertanian, ekspor jagung asal Gorontalo meningkat. Pada Januari 2009, sebanyak 3.600 ton jagung pipil siap dikapalkan ke Filipina dengan nilai transaksi sebesar Rp4,4 miliar. Pada 2008, dari sekitar 500.000 ton produksi jagung Gorontalo, sebanyak 177.182 ton dipasarkan ke luar Gorontalo: 79.385 ton diekspor ke Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan; dan sisanya dipasarkan ke Surabaya, Jakarta, dan Medan.



Gambar 3. Turunnya permintaan produk kakao dari AS dan Eropa berimbas pada subsektor perkebunan kakao di Indonesia

Singkong

Laporan mengenai dampak krisis terhadap komoditas singkong yang terpantau hanyalah laporan dari Provinsi Lampung. Saat krisis, harga singkong di tingkat petani turun hingga 50% dari sekitar Rp580 per kg menjadi sekitar Rp280–Rp300 per kg. Hal ini merugikan petani karena hasil panen tidak dapat menutupi biaya produksi, termasuk biaya pupuk dan angkutan. Akibatnya, banyak petani tidak dapat mengembalikan modal yang diperoleh melalui pinjaman. Tidak ada informasi mengenai sebab turunnya harga singkong secara signifikan, namun diketahui bahwa singkong merupakan bahan baku dalam pembuatan tepung tapioka yang merupakan salah satu komoditas ekspor andalan dari Provinsi Lampung.

Dampak terhadap Subsektor Perikanan

Ekspor perikanan Indonesia langsung melemah ketika permintaan dari AS turun 30%–40% saat terjadi KKG 2008/09. AS merupakan pasar utama ekspor perikanan Indonesia dan menyerap rata-rata 40% dari total ekspor nasional. Melemahnya ekspor perikanan Indonesia dimulai ketika beberapa pengimpor udang AS meminta negosiasi ulang kontrak guna menurunkan harga dan volume ekspor produk perikanan Indonesia. Selain itu, terjadi keterlambatan pembayaran dari pengimpor hingga dua minggu sejak kiriman diterima.

Biasanya, permintaan ekspor produk perikanan Indonesia mencapai puncaknya pada Oktober–Desember, namun hingga akhir 2008, belum terlihat adanya peningkatan permintaan. Di Sulawesi Utara, dilaporkan bahwa ekspor ikan ke AS, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan sejumlah negara Eropa selama krisis pada 2008 menurun drastis hingga 40%. Pada Oktober 2008, pesanan udang ekspor di Jawa Timur turun 10%–15% dan nilai ekspornya menurun akibat penurunan volume ekspor tersebut. Pada Maret 2009, permintaan naik 7%, namun kemudian turun 10,91% pada Juli 2009.

Di Bandar Lampung, saat memasuki masa tebar benur pada Oktober 2008, petambak udang mengurangi kepadatan benur dari 150 ekor per meter persegi menjadi 80–90 ekor per meter persegi karena harga udang turun dari Rp42.000–Rp47.000 per kg (isi 50 ekor per kg) menjadi Rp38.000 per kg. Padahal, biaya produksi satu kilogram udang biasanya mencapai Rp35.000. Meski pengurangan jumlah benur akan menurunkan biaya produksi, produksi udang juga akan turun. Diperkirakan bahwa produksi udang Lampung akan turun 40% dari total produksi 8.000 metrik ton per tahun sebelum krisis. Biaya produksi juga makin berat karena harga pakan udang naik dari Rp8.500–Rp9.000 per kg menjadi Rp10.000 per kg. Selain itu, petambak juga dibebani biaya pembelian solar yang tinggi dan penundaan pembayaran dari pengusaha *cold storage* (tempat penyimpanan udang bersuhu dingin) yang mulai tidak lancar karena pengusaha tersebut pun belum mendapatkan pembayaran dari kliennya.

Di DKI Jakarta, ikan cakalang ekspor yang biasanya di jual Rp12.500–Rp14.000 per kg saat krisis turun menjadi Rp8.000 per kg. Akibatnya, nelayan mengurangi pembelian solar dari 15–20 metrik ton untuk keperluan satu bulan menjadi 10–15 metrik ton yang hanya digunakan untuk melaut selama 20 hari saja. Secara keseluruhan, ekspor hasil perikanan pada 2009 yang ditargetkan mencapai US\$2,8 miliar dikhawatirkan tidak dapat tercapai akibat kekurangan pasokan.

Dampak terhadap Subsektor Peternakan Unggas

Secara tidak langsung, dampak KKG 2008/09 juga menyentuh subsektor peternakan unggas karena penurunan daya beli konsumen, khususnya akibat turunnya harga berbagai komoditas pertanian di luar Jawa, menyebabkan turunnya permintaan terhadap produk unggas. Selama krisis, permintaan harian terhadap ayam pedaging turun 10%–15%. Di Sumatra Selatan, kesulitan peternak bertambah karena harga ayam petelur usia satu hari (*day old chick/DOC*) yang biasanya hanya Rp4.000–Rp4.500 per ekor naik menjadi Rp10.000 per ekor. Turunnya daya beli konsumen juga mendorong terjadinya substitusi sumber protein dari daging dan ikan ke telur. Pada 2009, diperkirakan bahwa produksi telur akan meningkat 5% dari total produksi telur tahun sebelumnya dan mencapai 860.000 ton. ■

Lembaran fakta ini disusun oleh Hariyanti Sadaly berdasarkan hasil pemantauan berita yang dilakukan oleh Ratna Dewi dan Nur Aini (media nasional); dan Ara Wiraswara (Bogor), Ari Ratna Kurniastuti (Malang), Faisal Fuad Seiff (Banjarmasin), Firdaus Komar (Palembang), Gunadi (Medan), Johan Subarkah (Yogyakarta), Suardi Bakri (Makassar), dan Syahbudin Hadid (Mataram) dalam rangka kajian "Pemantauan Dampak Sosial-Ekonomi Krisis Keuangan Global 2008/09 di Indonesia" yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU. Dokumen asli berupa fail komputer dan klipring berita disimpan oleh Lembaga Penelitian SMERU. Editor: Budhi Adrianto.

Kunjungi situs web kami di:



<http://www.smeru.or.id>

¹Angka NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkan petani. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat daya beli petani.